Hukum Pidana.

Menjalankan pekerjaan sebagai advokat bukanlah pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1979 No. 187 K/Kr/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 1976 No. 1173/75 Pid. (Rol). dalam putusan mana tertuduh :

Raden Djoko Soeroso, umur kurang lebih 47 tahun, dilahirkan di Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman No. 175, desa Singonegaran, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan karyawan pada Jawatan Penerangan Banyuwangi.

tertuduh penuntut-kasasi berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh

"bahwa ia terdakwa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tidak-tidaknya diantara tahun 1973 sampai bulan Maret 1975, dirumah kediamannya terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 42 Banyuwangi, setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah menjalankan pekerjaan yang berdasarkan Peraturan Umum untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut memerlukan ijin, dalam keadaan tidak terpaksa dan mendesak, telah menjalankan pekerjaan tersebut, yaitu, terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas, dimana didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah terdaftar Pengacara resmi, jadi dalam keadaan tidak mendesak telah memasang tanda nama "Advocaat" - diatas meja kerja didalam rumah kediamannya, dan dengan pemasangan tersebut terdakwa kemudian telah menjalankan pekerjaan Advocaat atau sebutan pekerjaan lain yang semacam itu, sedangkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, ia tidak pernah diangkat dan ditetapkan atau memperoleh ijin dari yang berwajib"

Melanggar pasal 512 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan memperhatikan pasal 512 (1) K.U.H.P. jo pasal 6 a sampai dengan sub c Undang-Undang No. 1 (drt) tahun 1951 telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amat lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menerangkan, bahwa terdakwa R. Djoko Soeroso, S.H. tersebut diatas telah ber-salah melakukan perbuatan: "Dengan tiada terpaksa telah melakukan pekerjaan yang harus memakai ijin dari yang berwajib".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah).

Menentukan, bahwa apabila terdakwa tidak dapat memenuhi hukuman denda tersebut, diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sepuluh hari.

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menetapkan barang bukti berupa: dua lembar surat perjanjian (B. 1 dan B. 2) tetap dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1976/Pid./Kas. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1976 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 5 Maret 1976 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Maret 1976 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 18 Agustus 1977 No. 38/1977 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1951 jo pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1961 terhadap putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi :

Menimbang pula, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950,

sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970/

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Pebruari 1976 pada persidangan yang di hadiri oleh tertuduh dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 1976, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri di Banyuwangi pada tanggal 6 Maret 1976, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa perkara ini bukanlah termasuk perkara rol, karena penyidangannya berkali-kali dan membutuhkan waktu sampai 1 tahun;
2. bahwa tuduhan Jaksa sudah tepat karena hanya menyebutkan kwalifikasi, tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kesalahanyang dituduhkan kepada tertuduh;
3. bahwa tertuduh tidak pernah mengaku sebagai seorang advokat sedangkan perbuatan yang tertuduh lakukan dalam membantu orang sebagai seorang advokat tidak dapat dihukum karena belum ada peraturannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini dapat diterima karena Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan pasal 512 (1) K.U.H.P., karena apa yang dilakukan tertuduh bukanlah merupakan pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin;

Menimbang, bahwa karena itu perbuatan-perbuatan tertuduh tidak merupakan pelanggaran terhadap pasal 512 (1) K.U.H.P., dan juga tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran lainnya;

Menimbang, bahwa karena itu tertuduh harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 1976 No. 1173/1975 Pid. (Rol) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang

No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Raden Djoko Soeroso SH., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 1976 No. 1173/75 Pid (Rol)

Mengadili sendiri

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh Raden Djoko Soeroso SH. tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 1978 oleh **Busthanul Arifin SH.** sebagai Ketua, **Kabul Arifin SH.** dan **Purwosunu SH.** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Maret 1979 oleh **Busthanul Arifin SH.** sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh **Kabul Arifin SH.** dan **Purwosunu SH.** Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh **H.R. Sadili Sastrawijaya SH.** Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh **H. Eddy Djunaedi SH., M.C.J.** Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tg. 17-2-1976 No. 1173/1975 Pid (Kol)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANYUWANGI, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara Rol telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Raden Djoko Soeroso S.H., dilahirkan di Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman No. 175, desa Singonegaran, kecamatan dan kabupaten Banyuwangi, pekerjaan: karyawan pada Jawatan Penerangan Banyuwangi;

terdakwa berada diluar tahanan sementara

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Telah membaca surat tuduhan Jaksa;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah membaca dan mempelajari tangkisan terdakwa, maupun jawaban atas tangkisan tersebut oleh Jaksa;

Telah membaca Keputusan Sela;

Telah mendengar keterangan para saksi serta melihat surat bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa yang pada pokoknya, berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti dengan sah dan karenanya Jaksa mohon dapatnya kepada terdakwa telah terbukti dengan denda sebesar Rp.4.000,- subsidair 10 hari kurungan;

Telah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa dituduh telah melakukan perbuatan-sebagai berikut :

"bahwa ia terdakwa, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti, setidaknya diantaranya tahun 1973 sampai bulan Maret 1975, dirumah kediamannya terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 42 Banyuwangi, setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah menjalankan pekerjaan yang berdasarkan Peraturan Umum untuk melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan ijin, dalam keadaan tidak terpaksa dan mendesak, telah menjalankan pekerjaan tersebut, yaitu, terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas, dimana didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah terdaftar Pengacara resmi, jadi dalam keadaan tidak mendesak telah memasang tanda nama "Advocaat" diatas meja kerja didalam rumah kediamannya, dan dengan pemasangan tersebut terdakwa kemudian telah menjalankan pekerjaan Advocaat atau sebutan pekerjaan lain yang semacam itu, sedangkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, ia tidak pernah diangkat dan ditetapkan atau mem-

peroleh ijin dari yang berwajib”

Melanggar pasal 512 (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa memang betul pada waktu-waktu yang tidak diingatnya lagi dengan tepat, telah melakukan pekerjaan yang bersifat memberikan bantuan atas orang-orang yang meminta petunjuk kepadanya dalam bidang hukum, baik yang berbentuk membuat surat pengaduan, membuat surat permohonan/gugatan kepada Pengadilan Negeri, membuat memori banding, memori kasasi, atau nasehat-nasehat hukum lainnya sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang Sarjana Hukum, yang kesemuanya itu setelah dibuatkan lalu ditanda tangani oleh yang bersangkutan sendiri, dan untuk maksud-maksud mana terdakwa kadang-kadang telah menerima upah sebagai tanda terima kasih dari yang dibantunya yang besarnya tidak ditentukan olehnya;

bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum atau peraturan lainnya;

bahwa mengenai tanda nama Advocaat, diakuinya kalau tanda nama tersebut memang pernah terletak diatas meja kerjanya didalam rumah kediamannya, tetapi hal ini bukanlah terdakwa yang meletakkan maupun yang membuat tulisan tersebut melainkan dilakukan oleh isterinya, yang menginginkan agar nasib dari terdakwa akan lebih dapat meningkat sesuai dengan gelar Sarjana yang baru diperolehnya, lebih-lebih terdakwa yang sudah berkecimpung lama sebagai Karyawan Jawatan Penerangan Banyuwangi tidak menunjukkan suatu kemajuan, tegasnya isteri terdakwa menginginkan agar dengan pemasangan tersebut terdakwa dapat merubah proresi kerjanya menjadi Advocaat;

bahwa tanda nama tersebut tidak selamanya terletak diatas meja kerjanya melainkan sering dipindahkan ditempat lain;

bahwa tanda nama tersebut diatas kertas kertas putih bertuliskan hitam yang ukurannya kira-kira sama dengan tanda/papan "Hakim" yang terletak di meja sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

bahwa tanda tersebut dapat dilihat oleh para tamu yang kebetulan dekat dengan meja kerjanya (apabila tanda nama tersebut kebetulan dipasang/diletakkan diatas meja kerjanya);

bahwa perbuatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana telah diuraikan dengan panjang lebar dalam pledoi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya beresesuaian dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Imam Humaidi SH, Abdurrahman SH., Nasiah, serta keterangan para saksi yang dibacakan keterangannya di persidangan karena yang bersangkutan tidak dapat hadir yang mana keterangan para saksi tersebut diakui

kebenarannya oleh terdakwa, juga dengan adanya surat bukti B.1 dan B.2, maka terdapatlah suatu kenyataan bagi diri terdakwa, bahwa terdakwa telah menaruh/meletakkan setidak-tidaknya menggunakan tanda nama Advocaat diatas meja kerjanya yang terletak diruang tamu di tempat kediamannya, dan didalam kesibukannya selaku pegawai pada Jawatan Penerangan telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang telah datang kepadanya yang berupa membuat surat pengaduan, surat permohonan/gugatan, memori banding, memori kasasi, atau bantuan lainnya sesuai dengan pengetahuannya sebagai seorang Sarjana Hukum, dan untuk maksud tersebut terdakwa telah menerima upah sekalipun besarnya tidak tentu;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa yang menyatakan segala sesuatu tentang tanda nama Advocaat adalah terlepas darinya sebab yang mengatur segalanya adalah isterinya, adalah tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin hal itu bisa berjalan dalam waktu relatif lama sedangkan terdakwa sebagai kepala keluarga, lebih-lebih sebagai seorang yang telah bertitel Sarjana Hukum yang tentunya mengerti apa itu Advocaat dan bagaimana procedure pengangkatannya, tetapi toh terdakwa mendiamkan saja sehingga menunjukkan adanya keinginan terdakwa untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dari yang sudah ternyata dapat dihubungkan dengan tuduhan Jaksa, Pengadilan Negeri akan meninjau beberapa hal sebagai berikut :

Advocaat adalah (advocaat/procureur) yaitu: mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman;

Mengenai pengaturan tentang advocaat sampai saat ini belum ada, kecuali apa yang telah diatur dalam Stb. 1847/No. 23 (Rechtelijke Organisatie/R.O) khususnya pasal-pasal 185 sampai dengan pasal 192;

Dari Staatsblad 1847/23 tersebut diatas ada beberapa bagian yang sudah diatur tersendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, yang memerintahkan antara lain pembuatan suatu peraturan tata usaha Kepolisian beserta Pengadilan Sipil dan penuntutan perkara-perkara kriminil untuk golongan Bumiputera dan yang disamakan.

Dan sebagai realisasi dari pasal 4 tersebut kemudian diumumkan Stb, 1848 No. 16 dengan memakai nama yang lazim disebut Inlandsch Reglement (I.R.), dan I.R ini telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana tersebut pada Staatsblad 1926 No. 559; Stb. 1941 No. 32 dan kemudian Stb. 1941 No. 44 yang lebih terkenal dengan sebutan Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.), sedangkan mengenai advocaat sendiri belum ada peraturannya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian bukanlah berarti bahwa R.O. yang mengatur tentang advocaat tersebut tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa pasal II Aturan Peralihan U.U.D. '45 menyebutkan a.l bahwa segala Badan Negara dan Peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan menurut U.U.D. ini;

Dengan landasan pasal II Aturan Peralihan tersebut diatas, maka pasal-pasal yang mengatur tentang advocaat dari Stb. 1847 No. 23 masih tetap berlaku, dan sebagai kenyataan Menteri Kehakiman sampai saat ini masih tetap mengangkat dan memberhentikan advocaat dan untuk menjadi advocaat masih diharuskan adanya surat Keputusan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 186 R.O.;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan tidak diperkenankan seorangpun mengaku dirinya advocaat serta melakukan pekerjaan tersebut sebelum mendapat ijin/keputusan dari Menteri Kehakiman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan advocaat banyak macamnya bukan hanya berhak maju pada sidang-sidang Pengadilan saja, tetapi lebih dari itu, misalnya dapat mengunjungi terdakwa yang sedang berada dalam tahanan dan sebagainya, membuat surat-surat yang ada hubungannya dengan persoalan cliennya, termasuk membuat surat pengaduan/gugatan, memori dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apakah dengan pemasangan tanda nama advocaat dapat di samakan telah mengaku sebagai Advocaat ?

Menimbang, bahwa pemasangan tanda yang demikian tentu dengan maksud-maksud tertentu, tidak mungkin seseorang suka bersusah payah membuat/menulis lalu menaruhnya diatas meja kerja, tanpa maksud apapun, lebih-lebih terdakwa sebagai seorang Sarjana Hukum yang tahu dan mengerti akan fungsi serta tujuan advocaat kemudian membiarkan saja tanpa ada tujuan atau maksud tertentu, betul-betul tidak masuk akal, lebih-lebih dengan alasan bahwa segalanya adalah kehendak serta atas inisiatief dari isterinya;

Sebagai realisasi dari maksud serta keinginan tersebut, terdakwa telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan advocaat sebagaimana telah diterangkan diatas yang kesemuanya dengan mendapat upah yang besarnya tidak tentu;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa yang menganggap surat tuduhan Jaksa tidaklah secara terperinci menyebutkan Peraturan Umum mana yang dilanggar oleh terdakwa, Pengadilan Negeri mengambil alih segala pertimbangan yang telah disebutkan dalam Keputusan Sela tertanggal 18 Desember 1975, sehingga mengenai hal ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 512 ayat 1 K.U.H.P. dimana unsur-unsurnya dapat disebutkan antara lain :

1. Melakukan sesuatu pekerjaan;
2. Dilakukan dengan tiada ijin yang diatur oleh Undang-undang Umum;
3. Dilakukan dengan tidak terpaksa;

Ad.1. Sebagaimana telah diterangkan diatas, baik dari keterangan terdakwa

maupun dari keterangan saksi juga dengan adanya bukti B.1 dan B.2, maka ternyata bahwa diatas meja kerja terdakwa didalam rumahnya telah terletak tanda nama Advocaat yang bisa dibaca jelas oleh orang yang kebetulan menjadi tamu terdakwa, sebab sebagaimana keterangan terdakwa ukuran dari tanda nama tersebut kira-kira sama dengan tanda nama Hakim yang ada dimeja sidang ini;

Selanjutnya terdakwa mengakui juga telah membantu membuat surat-surat gugatan (kepada saksi Joni Soffa Johannes) surat Memori Banding/Kasasi (kepada saksi Munanti alias Bok Ros serta saksi Nasiah) juga kepada saksi Djakpar Husen sebagaimana dapat dilihat dari surat bukti B.1 dan B.2 yang kesemuanya dengan mendapatkan upah walaupun besarnya tidak tentu;

perbuatan dan atau pekerjaan yang dilakukan tersebut ada dan erat hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advocaat, lebih-lebih terdakwa telah menaruh/meletakkan setidak-tidaknya membiarkan tanda advocaat tersebut diatas meja kerjanya yang hal ini dapat diartikan menganggap dirinya advocaat. Dus pekerjaan yang dilakukan olehnya adalah bahagian dari pekerjaan advocaat.

Ad.2. Dalam jawaban-jawaban terdakwa baik yang tersebut dalam tangkisan (exemptie) maupun dalam pledoi telah mengerti bahwa advocaat sebagaimana disebutkan dalam pasal 186 R.O. diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman oleh karenanya untuk mendapatkan dan baru boleh disebut sebagai advocaat harus ada ijin yang berbentuk Surat Ketetapan dari Menteri Kehakiman;

Sebagaimana telah diterangkan diatas R.O. tersebut masih tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan U.U.D. 1945;

Mahkamah Agung dalam menertibkan soal Pembela dan Pengacara serta semacamnya pada rapat kerja dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia tanggal 22 Juni 1972, telah menuangkan keputusan No. 5/K.M.A./1972, antara lain menginstruksikan kepada Pengadilan--Pengadilan Tinggi untuk mengatur lebih lanjut tentang Pengacara dan semacamnya;

Dari apa yang telah diterangkan diatas dapatlah diartik kesimpulan bahwa memang ada peraturan umum yang mengatur tentang advocaat tersebut;

Ad.3. Mengenai hal ini kiranya tidak perlu dikemukakan panjang lebar sebab jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan serta tindakan yang telah diuraikan diatas dengan tidak terpaksa sebab selain terdakwa sebagai seorang karyawan pada Jawatan Penerangan Banyuwangi tidak mungkin dapat dikatakan terpaksa melakukan pekerjaan tersebut sebagai obyek tambahan, lebih-lebih terdakwa bukanlah tergolong orang yang tidak mampu, juga pekerjaan tersebut semestinya bisa dialihkan kepada orang yang telah diketahuinya telah mendapatkan ijin yang sah dari Pengadilan Tinggi (Pengacara Praktek) sehingga dalam hal ini tidak satu unsurpun yang dapat memaksa terdakwa sehingga melakukan pekerjaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan

harus dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;

Menimbang, tentang berat ringannya hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa Pengadilan Negeri dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dipersidangan serta memberikan keterangan secara wajar dan tidak mempersulit pemeriksaan.
2. Terdakwa sudah tergolong lanjut usia;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Sarjana Hukum seharusnya tahu dan mengerti tentang advocaat serta segala efek yang menyangkut tentang advocaat tersebut sehingga seharusnya tidak akan melakukan pekerjaan yang diuraikan tersebut diatas;
2. Untuk ketertiban serta perlindungan bagi pencari keadilan, khususnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat-surat ketetapan yang mengatur tertibnya pelaksanaan Pengacara (Ketetapan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 5/1969; Ketetapan Mahkamah Agung No. 5/K.M.A./1972) dengan harapan agar pelaksanaan kepengacaraan menjadi tertib dan tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai Pembela dan semacamnya yang nantinya akan merugikan masyarakat.

Terdakwa sebagai seorang Sarjana Hukum tentunya mengerti dan paham akan maksud dan tujuan dari ketetapan tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa tuntutan Jaksa atas hukuman yang dikenakan kepada terdakwa adalah sudah sepadan dengan kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dihukum maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena erat hubungannya dengan berkas perkara Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk menentukan agar barang bukti tersebut tetap berada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang ada hubungannya dengan Pleidoi dari terdakwa dianggap sebagai telah terjawab dalam keputusan ini sedangkan selebihnya haruslah dikesampingkan.

Mengingat pada pasal 512 (1) K.U.H.P. jo pasal 6 sampai dengan sub. e U.U. No. 1 (drt) tahun 1951, Bab IX dari Reglement Indonesia Yang Dibaharui serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerangkan, bahwa terdakwa R. Djoko Soeroso SH tersebut diatas telah ber-salah melakukan perbuatan :

"Dengan tiada terpaksa telah melakukan pekerjaan yang harus memakai ijin dari yang berwajib";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

Menentukan, bahwa apabila terdakwa tidak dapat memenuhi hukuman den-da tersebut, diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya "sepuluh hari";

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menetapkan barang bukti berupa dua lembar surat perjanjian (B.1 dan B.2) tetap dalam berkas perkara ini;

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Selasa tanggal 17 Pebruari 1976, oleh kami: Soekarno Moeljo, Hakim Pengadilan Negeri di Banyuwangi, dan pada hari itu juga keputusan tersebut diumumkan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Soemarno, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Banyuwangi, Panitera Pengganti: R. Ariadi, serta terdakwa.